

B A B V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi hasil penelitian seperti dikemukakan pada bab IV, berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian.

1. Persepsi Kepala Sekolah tentang peranannya sebagai Supervisor Pengajaran.

Persepsi Kepala Sekolah tentang supervisor pengajaran adalah kegiatan pembinaan profesional harus dilakukan Kepala Sekolah kepada guru-guru dan personil lainnya, dalam bentuk bantuan dan bimbingan terhadap guru-guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar mengajar.

Pemahaman Kepala Sekolah tentang peranannya sebagai supervisor pengajaran setelah mengikuti penataran, pengetahuan yang dimilikinya masih dalam taraf penguasaan teoritis, umum dan kurang kemampuan praktis dalam operasional serta tidak didukung pengetahuan ap- persepsi yang cukup. Sehingga Kepala Sekolah mendapat kesulitan melaksanakan bimbingan terhadap guru di lapangan. Adanya gejala sikap kurang puas Kepala Sekolah dan guru terhadap sistem pelaksanaan penataran , yaitu

materi yang disampaikan terlalu banyak, padat, umum, kurang latihan simulasi, dan disampaikan dalam waktu relatif singkat (12 hari). Adanya gejala konflik pada pribadi Kepala Sekolah antara tuntutan atasan harus melaksanakan kebijakan pengajaran, harapan guru memerlukan pembinaan, dengan pemahaman dan pengetahuannya sebagai supervisor pengajaran yang belum memadai. Usaha Kepala Sekolah untuk menambahkan pemahamannya tentang peranannya sebagai supervisor pengajaran, melalui kegiatan diskusi, dengan mengadakan pertemuan/pembicaraan pribadi, pertemuan kelompok dengan Kepala SD lainnya (KKKS dan PKG), serta belajar sendiri dengan membaca buku Kurikulum-Pedoman Pembinaan Guru. Untuk mencatat data hasil supervisi Kepala Sekolah telah mempersiapkan instrumen supervisi, seperti alat observasi kelas, angket dan checklist.

Efektivitas perilaku dan keberhasilan Kepala Sekolah melaksanakan pembinaan profesional erat hubungannya dengan persepsi dan pemahamannya tentang peranannya sebagai supervisor pengajaran.

Kendala yang dihadapi Kepala Sekolah dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap guru-guru, selain kemampuan praktis yang belum memadai dan tidak adanya petunjuk praktis pelaksanaan pembinaan guru, juga terbatasnya sarana pendidikan yang berhubungan dengan profesinya.

Perbedaan yang nampak, selain tingkat pemahaman dan ketrampilan tentang peranannya sebagai supervisor pengajaran berbeda, juga Kepala SDN 001 Sapat Kuindra dan SDN 039 Sei Hukum Concong Dalam tidak mempersiapkan instrumen supervisi, jumlah tenaga pengajar yang kurang, sikap dan partisipasi masyarakat (BP3) tentang pendidikan kurang, serta sulitnya mendapat sarana pengetahuan yang berhubungan dengan profesinya karena faktor geografis dan ekonomis.

2. Persepsi Kepala Sekolah tentang pendekatan CBSA setelah mengikuti Penataran.

Persepsi Kepala Sekolah tentang pendekatan CBSA adalah suatu teknik, strategi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, yang menekankan keaktifan murid dalam mencapai tujuan instruksional, melalui kegiatan ketrampilan proses. Peranan guru sebagai fasilitator untuk membantu pembelajaran siswa.

Pemahaman Kepala Sekolah tentang pendekatan CBSA masih pada tingkat penguasaan teoritis, umum, kurang kemampuan praktis operasionalnya. Hal ini disebabkan materi penataran yang diberikan terlalu banyak, padat, kurang praktek simulasi atau latihan, dan disampaikan dalam waktu relatif singkat (sekitar 10-12 hari), adanya gejala kurang puas Kepala Sekolah dan guru terhadap hasil dan proses pelaksanaan penataran, sehingga terjadi

konflik pada Kepala Sekolah, antara tuntutan atasan harus melaksanakan kebijaksanaan pengajaran (CBSA), harapan guru memerlukan bimbingan, dengan pemahaman dan kemampuan Kepala Sekolah tentang pendekatan CBSA yang belum memadai.

Adanya kecenderungan Kepala Sekolah dan guru dalam pelaksanaan pendekatan CBSA ini mengidentikkan dengan metode diskusi dan kerja kelompok antar murid (aktivitas fisik).

Efektivitas keberhasilan Kepala Sekolah melaksanakan peranannya sebagai supervisor pengajaran erat hubungannya dengan pemahamannya terhadap materi yang disupervisi.

Kendala yang dirasakan Kepala Sekolah dalam menerapkan pendekatan CBSA adalah selain pemahamannya tentang supervisi pengajaran dan penguasaan materi CBSA yang belum memadai, juga keterbatasan fasilitas pendidikan, sikap murid pasif, dan partisipasi masyarakat masih kurang.

Perbedaan yang nampak pada ketiga SD yang diteliti adalah tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, partisipasi masyarakat relatif masih kurang pada SDN 001 Sapat Kuinda, dan SDN 039 Sei Hukum Conccong Dalam.

3. Kegiatan Kepala Sekolah sebagai Supervisor Pengajaran dalam menyusun Program Supervisi Pengajaran.

Setiap awal tahun ajaran Kepala Sekolah dengan dibantu beberapa orang guru menyusun perencanaan atau program kegiatan pendidikan dan pengajaran tahunan, termasuk program supervisi pengajaran.

Proses penyusunan program kegiatan pendidikan dan pengajaran tahunan, melalui kegiatan tahap orientasi dan pengumpulan data dengan mempelajari Kalender Pendidikan dan masukan saran, usul, pendapat dari seluruh personil yang ada di sekolah. Data tersebut dianalisis menjadi informasi dalam penyusunan rencana atau program pendidikan dan pengajaran tahunan di sekolah, termasuk program "supervisi pengajaran. Setiap awal tahun ajaran program-program kegiatan di sekolah disusun kembali setelah melalui proses evaluasi terhadap hasil dan proses supervisi pengajaran, untuk merevisi penyusunan program pendidikan dan pengajaran sekolah berikutnya.

Efektivitas keberhasilan Kepala Sekolah menyusun program supervisi pengajaran erat hubungannya dengan pemahamannya tentang supervisi pengajaran, administrasi pendidikan serta latar belakang pendidikan dan pengalamannya.

4. Kegiatan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pembinaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kepala Sekolah dalam proses pembinaan profesional terhadap guru-guru adalah melalui pertemuan individual dan pertemuan kelompok, dengan menggunakan teknik kunjungan kelas, pembicaraan pribadi dan diskusi kelompok (rapat dinas/supervisi).

Pertemuan individual/pribadi, teknik yang selalu digunakan Kepala Sekolah untuk mengadakan dialog pribadi dengan guru-guru. Frekuensi pertemuan satu kali seminggu atau lebih, jika ada masalah yang perlu dipecahkan bersama personil lainnya. Pertemuan dengan guru didasarkan pertimbangan prioritas guru yang perlu dibina (belum cakap), dan kurang dibina (cakap). Pertemuan diadakan di ruang kerja Kepala Sekolah atau ruang kelas guru yang bersangkutan, dalam situasi formal dan informal, dengan didasari rasa kekeluargaan, keterbukaan dan kerjasama.

Kunjungan Kelas untuk mengadakan observasi kelas, teknik supervisi ini jarang sekali dilaksanakan Kepala Sekolah, karena erat kaitannya dengan tingkat pemahaman dan ketrampilan Kepala Sekolah tentang penggunaan teknik kunjungan kelas, pengertian guru terhadap maksud kunjungan dilakukan, serta keterampilan komunikasi, manajerial dan teknis edukatif.

Pertemuan kelompok dalam bentuk rapat dinas/supervisi dilaksanakan secara priodek sebulan satu kali atau lebih, jika ada masalah atau hal-hal yang perlu dibicarakan dan diputuskan yang memerlukan keterlibatan guru dan personil lainnya.

Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG), Kepala Sekolah berperan sebagai Pembina dan Narasumber, kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap minggu secara bergiliran sekolah yang terlibat. Akhir-akhir ini hanya dilaksanakan satu kali sebulan, jika ada masalah yang berhubungan dengan proses belajar mengajar yang perlu didiskusikan. Hal ini terjadi karena hambatan kurangnya koordinasi antara Kepala Sekolah, kurang pengarahan dari Penilik SD, dana dan transportasi. Peranan Kepala Sekolah sebagai pembina adalah memberikan pengarahan dan saran-saran, jika diperlukan oleh peserta diskusi, serta mengidentifikasi masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh kelompok diskusi, untuk disampaikan dan didiskusikan dalam kelompok KKKS dan PKG. Pertemuan KKKS dan PKG selama tahun ajaran 1990-1991 hanya pernah dilaksanakan dua kali. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara Kepala Sekolah, dan antara Kepala Sekolah dengan atasan.

Perbedaan yang nampak adalah kunjungan kelas hanya pernah dilaksanakan oleh Kepala SDN 008 Tembila-han Kota. Kepala SDN 039 Sei Hukum Concong Dalam tidak

pernah mengadakan dan menghadiri KKG. karena faktor geografis dan dana.

5. Hal-hal yang Biasanya Dibicarakan Kepala Sekolah dalam Proses Pembinaan guru.

Dalam Kegiatan proses pembinaan profesional guru, hal-hal atau masalah yang selalu dibicarakan, baik dalam pertemuan pribadi/individual, maupun pertemuan kelompok adalah adanya perilaku Kepala Sekolah memperlihatkan praktek pembinaan yang biasanya menyangkut segi fisik, administrasi kelas saja, seperti bangunan, pendanaan, kepegawaian dan fasilitas lainnya, telah mengarah kepada pembinaan terhadap proses belajar mengajar, yaitu bantuan dan bimbingan terhadap aspek profesional guru, namun masih menunjukkan kepada aspek penyelesaian administratif, seperti penyusunan program caturwulan, satuan pelajaran, lembaran kerja siswa dan alat evaluasi. Masih kurang mengindahkan pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas.

Pemahaman Kepala Sekolah tentang bahan pelajaran bidang studi (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PMP), rata-rata berada pada kategori baik, yakni mampu dipahami 84 % dengan baik. Bidang studi IPS dan PMP adalah 95 %, Bahasa Indonesia dan IPA adalah 82 %, dan bidang studi matematika adalah 67 %.

Untuk menenggalangi masalah ini Kepala Sekolah menunjuk beberapa orang guru sebagai guru pemandu bidang studi,

yang dikoordinir oleh seorang guru sebagai bagian pengajaran pembantu Kepala Sekolah. Ketidak mampuan Kepala Sekolah menguasai materi pelajaran ini karena tugas Kepala Sekolah lebih banyak tertumpu dengan penyelesaian administrasi sekolah, jarang mengajar dan kurang mendapat kesempatan penataran bidang studi.

Kepala Sekolah selalu menggunakan dan menyarankan guru untuk menerapkan metode ceramah dan tanya-jawab dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Kepala Sekolah terhadap metode mengajar. Dan kadang-kadang diselingi dengan metode diskusi antara murid. Kriteria pemahaman Kepala Sekolah terhadap metode mengajar penulis lihat dari sering tidaknya digunakan dan disarankan Kepala Sekolah metode mengajar terhadap guru-guru.

Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing, jika kasus murid tidak dapat diselesaikan oleh guru yang bersangkutan, kasus tersebut didiskusikan dengan Kepala Sekolah. Bimbingan dan penyuluhan di sekolah belum dilembagakan, atau bagian khusus yang mengelola kasus-kasus murid, hal ini terjadi karena Kepala Sekolah dan guru tidak pernah mendapatkan pendidikan dan penataran tentang bimbingan penyuluhan, serta bimbingan dari atasan.

Pengelolaan bahan tes sumatif dilaksanakan oleh

Kantor Departemen P dan K, disusun berdasarkan target kurikulum, tanpa uji coba soal untuk menentukan tes yang baik, serta menentukan tingkat kesukaran item tes. Kepala Sekolah dan guru berpendapat sebaiknya pengelolaan tes ini dilaksanakan oleh sekolah masing-masing, karena mampu mengukur proses dan hasil belajar siswa, sesuai dengan pendekatan CBSA.

6. Pola hubungan Kepala Sekolah dan Guru

Hubungan antara Kepala Sekolah dan guru memperlihatkan komunikasi dua arah, yaitu hubungan kesejawatan yang di dasari nilai dan sikap keterbukaan, kekeluargaan, kerjasama dan keteladanan, merupakan kondisi yang kondusif, bagi terjadinya proses pembinaan profesional yang dilakukan Kepala Sekolah terhadap guru guru, walaupun dalam proses komunikasi Kepala Sekolah cenderung lebih banyak berinisiatif dan menentukan, baik dalam forum pertemuan diskusi, maupun dalam pengambilan keputusan, hingga ada gejala komunikasi satu-arah.

Sikap keterbukaan Kepala Sekolah yang mau mendengar semua keluhan guru memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif. Suasana seperti itu guru-guru merasa dihargai dan diperlukan, sehingga guru-guru merasa berani dan bebas membicarakan masalah yang dihadapi dalam mengelola proses belajar mengajar dan masalah pribadi. Perilaku pola hubungan Kepala Sekolah dengan guru erat

kaitannya dengan pemahamannya sebagai pemimpin dan supervisor pengajaran.

Terlihat dari sikap dan perilaku Kepala Sekolah mencerminkan kepemimpinan partisipatif dan demokratis.

Perbedaan yang nampak, adalah Kepala SDN 008 Tembilahan Kota menunjukkan adanya perilaku kepemimpinan yang lebih terbuka mendiskusikan segala masalah dengan guru dan memutuskan bersama, Kepala SDN 001 Sapat Kuindra lebih banyak inisiatif dan menentukan dalam forum diskusi (cenderung kemonikasi satu arah) dalam pengambilan keputusan, sedangkan Kepala SDN 039 Sei Hukum Concong Dalam memperlihatkan sikap dan perilaku memberikan kebebasan yang terlampau luas kepada masing-masing guru, sehingga cenderung mengurangi peranan Kepala Sekolah sebagai pimpinan dan pengambil keputusan.

7. Keterlibatan Penilik SD sebagai Supervisor Pengajaran

Kegiatan yang dilakukan Penilik SD dalam upaya melaksanakan peranannya sebagai supervisor pengajaran, untuk memberikan pembinaan profesional kepada Kepala Sekolah dan guru, melalui kegiatan kunjungan ke sekolah, untuk mengadakan pertemuan pribadi dan pertemuan kelompok, serta menghadiri acara KKG. Kunjungan dilakukan lebih banyak mengadakan pertemuan pribadi dengan Kepala Sekolah, Hal-hal yang dibicarakannya

adalah memantau pelaksanaan kurikulum dan kegiatan sekolah, cenderung kepada perbaikan proses belajar mengajar, namun masih mengarah kepada penyelesaian aspek administratif, seperti penyusunan rencana proses belajar mengajar, dan administrasi sekolah. Hal ini erat hubungannya dengan pemahamannya tentang peranannya sebagai supervisor pengajaran, dan penguasaan materi disupervisi.

Perbedaan yang nampak, Penilik SD aktif mengadakan kunjungan ke SDN 008 Tembilihan Kota, dan SDN 001 Sapat Kuindra setiap bulan, sedangkan SDN 039 Sei Hukum Concong Dalam belum pernah dikujungnya, hal ini terjadi karena faktor sulitnya hubungan transportasi dan dana supervisi relatif masih kurang.

8. Faktor penghambat yang dihadapi Kepala Sekolah dalam melaksanakan supervisi pengajaran

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor penghambat yang dihadapi Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor pengajaran, adalah :

- 1). Pemahaman tentang supervisi pengajaran /pembinaan profesional guru masih dalam tahap penguasaan teoritis, umum, kurang memiliki kemampuan praktis, sehingga Kepala Sekolah selalu menghadapi kendala untuk melaksanakan teori-teori, prinsip-prinsip yang telah diterimanya selama penataran di seko-

lah. Hal ini disebabkan materi penataran yang diberikan oleh Tim Penatar terlalu banyak, dipadatkan, umum dan kurang sekali latihan-latihan atau simulasi praktek lapangan, disampaikan dalam waktu relatif singkat.

- 2). Fasilitas pendidikan seperti alat peraga, sumber-sumber belajar yang masih terbatas, dan sulit didapat di daerah ini.
- 3). Gaji dan kesejahteraan Kepala Sekolah dan guru yang relatif masih kurang untuk memenuhi kebutuhan wajar keluarganya, menyebabkan merosotnya motivasi dan moral kerja, sehingga menyulitkan kerjasama penuh para guru-guru untuk melancarkan pelaksanaan pembaharuan, karena hanya berarti tambahan kerja saja buat mereka sedangkan keadaan kebutuhan keluarga masih menjadi masalah dalam kehidupan keluarga sehari-hari.
- 4). Sulitnya mendapatkan sumber bacaan, bulletin pendidikan/supervisi dan sarana-sarana yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan profesionalnya, terutama supervisi pengajaran.

Perbedaan yang nampak, fasilitas pendidikan, partisipasi masyarakat dan serana usaha menambah pengetahuan profesional untuk Kepala Sekolah dan Guru pada SDN 001 Sapat Kuindra dan SDN 039 Sei Hukum Concong Dalam relatif

masih kurang, dan pada SDN 039 Sei Hukum Concong Dalam hubungan transportasi sangat sulit. Sedangkan pada SDN 008 Tembilaan Kota relatif telah cukup.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, diskusi dan kesimpulan yang diuraikan di atas, selanjutnya penulis merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perilaku Supervisi Pengajaran

Hasil penelitian telah memperjelas beberapa aspek perilaku Kepala Sekolah sebagai supervisor pengajaran, dalam upaya memberikan pembinaan profesional terhadap guru-guru dan personil lainnya, dengan maksud meningkatkan kualitas proses belajar mengajar belajar. Aspek-aspek perilaku tersebut menyangkut pemahaman Kepala Sekolah tentang peranannya sebagai supervisor pengajaran, penyusunan program pembinaan, kegiatan dalam proses pembinaan, masalah dan hal-hal yang dibicarakan dalam proses pembinaan, dan pola hubungan yang diperlihatkan kepala sekolah, disamping aspek-aspek perilaku Kepala Sekolah tersebut di atas tidak dipersoalkan dalam penelitian ini.

Perilaku Kepala Sekolah tersebut di atas mencerminkan perilaku peranan Kepala Sekolah sebagai supervisor pengajaran dalam menyusun dan melaksanakan

pembinaan profesional terhadap guru-guru. Perilaku supervisi adalah suatu perilaku yang ditampilkan supervisor atau Kepala Sekolah, dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku orang yang disupervisi atau guru sedemikian rupa ke arah peningkatan perbaikan proses belajar mengajar. Perilaku ini tumbuh dari komitmen oleh pemahaman dan penguasaan tentang peranannya sebagai supervisor pengajaran, kecintaan dan keikhlasannya untuk melaksanakan tugasnya, serta memiliki keberanian berbuat sesuai dengan tuntutan fungsi dan peranannya.

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya harus menempatkan diri pada posisi yang memungkinkan Kepala Sekolah dan guru saling membutuhkan dalam melaksanakan peranannya masing-masing, maksudnya guru harus memahami apa yang diharapkan Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah harus memahami apa yang diharapkan guru daripadanya. Hubungan antara Kepala Sekolah dan guru seperti tersebut di atas terwujud melalui komunikasi dua arah, kesejawatan yang dilandasi rasa kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan dan sikap keteladanan dari Kepala Sekolah. Perilaku-perilaku itu diharapkan mampu mendorong guru merasa percaya diri dan bertanggung-jawab untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Jika Kepala Sekolah memperlihatkan perilaku yang berlawanan dengan perilaku-perilaku di atas, dan sikap memeriksa,

menyalahkan, memungkinkan akan melahirkan sikap masa bodoh, tidak kritis, kurang inisiatif dan kreatif. Jadi perlu dikembangkan adanya perilaku inisiatif dan kreatif pada guru. Kepala Sekolah hendaknya memperlihatkan sikap memberikan motivasi kepada guru untuk berinisiatif, kreatif dan berani mengadakan perubahan dan pembaharuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, serta Kepala Sekolah menghargai segala upaya guru dalam menerapkan inovasi baru dalam proses belajar mengajar.

2. Program Pendidikan dan Latihan Kepala Sekolah

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kepala Sekolah sebagai supervisor pengajaran tidak mampu melaksanakan peranannya secara efektif, jika tidak memiliki pemahaman dan ketrampilan dibidang tugasnya, yaitu sebagai supervisor pengajaran, penggerak perubahan dan pelayanan untuk memajukan pengajaran. Pemahaman dan trampil melaksanakan pembinaan profesional tidak akan berjalan dengan lancar tanpa pemahaman terhadap teori-teori yang diimplikasikan dalam perilaku supervisi pengajaran, yaitu teori organisasi, teori kepemimpinan, teori komunikasi, teori pengambilan keputusan dan teori perubahan perilaku, sebab perilaku Kepala Sekolah sebagai supervisor pengajaran berkaitan erat dengan pemahaman tentang teori-teori tersebut, dan peranannya

sebagai supervisor pengajaran. Untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman dan ketrampilan Kepala Sekolah terhadap peranannya sebagai supervisor pengajaran adalah melalui kegiatan program pendidikan dan latihan bagi Kepala Sekolah. Penelitian mengungkapkan bahwa persepsi Kepala Sekolah tentang proses dan hasil penataran yang dilaksanakan Depdikbud dari Proyek P3D, menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan terlampau singkat, materi yang diberikan relatif banyak (dipadatkan), sehingga pemahaman para peserta penataran sangat bersifat teoritis, kurang menguasai ketrampilan praktis. Sedangkan harapan Kepala Sekolah penguasaan teori-teori, juga mampu menerapkannya di sekolah. Jadi pemahaman teoritis, hendaknya lebih banyak mengadakan latihan-latihan praktis di lapangan, yang nantinya akan menghasilkan orang-orang yang memiliki pemahaman teoritis dan paraktis, yaitu pemimpin pendidikan partisi-patif yang menekankan pembaharuan untuk melakukan perbaikan kualitas proses belajar mengajar.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis merasakan perlunya program pendidikan dan latihan khusus bagi Kepala Sekolah, yang memungkinkan mereka benar-benar menjadi seorang Administrator dan Supervisor yang berkompeten. Tujuan program pendidikan dan latihan Kepala Sekolah tersebut adalah agar Kepala Sekolah

memiliki pengetahuan, sikap, dan ketrampilan khusus bagi seorang pemimpin pendidikan usaha perbaikan proses belajar mengajar, atau perbaikan kualitas belajar siswa khususnya. Program pendidikan dan latihan Kepala Sekolah itu hendaknya benar-benar memperhitungkan waktu, dana dan lingkungan pelaksanaan yang efektif, dengan banyaknya bahan atau materi latihan, dan diikuti petunjuk penyelenggaraannya. Pelaksanaan pendidikan dan latihan tersebut hendaknya lebih menekankan keterlibatan peserta pendidikan dan latihan melalui diskusi, analisis kasus, simulasi dan praktek langsung ke lapangan.

3. Penerapan Pendekatan CBSA di Sekolah Dasar.

Pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dalam proses belajar mengajar memiliki prinsip "*menemukan pengetahuan lebih baik daripada belajar menerima pengetahuan*". Namun upaya untuk melaksanakan CBSA ini menuntut adanya latar belakang budaya yang sudah lama tertanam, yaitu budaya diskusi melalui debat seru, suasana demokratis, baik guru maupun murid mempunyai kedudukan yang sejajar, tidak ada yang harus ditinggikan maupun direndahkan, dan membiasakan berpikir untuk menelaah dan mengungkapkannya, atau kebiasaan mengemukakan pendapat sekaligus beradu argumentasi atas pendapat orang lain, masih merupakan

kebudayaan yang agak jauh dari jangkauan kebiasaan selama ini tertanam. Selanjutnya pelaksanaan tes di Sekolah Dasar, bahan tes atau bahan ujian hampir selalu berbentuk pilihan ganda, dan bukan esai, dan pelaksanaan penyusunan dan penggandaan tes dikoordinir oleh Kandepdikbud, yang cenderung pengukuran terhadap aspek kognitif atau hafalan, bukan ketrampilan proses pada siswa. Pertanyaan yang timbul sekarang ini, sejauhmanakah penerapan CBSA telah memenuhi target yang diharapkan, hingga saat sekarang ini di Indragiri Hilir telah memasuki tahun keempat semenjak CBSA ini mulai dilaksanakan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap pendekatan CBSA oleh tenaga kependidikan di daerah ini tidak sama, apa yang dipahami para guru tentang CBSA, belum tentu sama dengan yang dipahami oleh Kepala Sekolah dan Penilik, dan lebih jauh lagi, belum tentu dipahami oleh para birokrat Depdikbud di daerah ini, sehingga tidak tertutup kemungkinan seorang pejabat yang lebih tinggi di bidang pendidikan justru "menghambat" terwujudnya proses implementasi pendekatan ini. Kesenjangan seperti ini sangat merugikan upaya pembaharuan di atas, mengingat orientasi pendidikan di negara kita tercinta ini masih bersifat sentralistis, di mana kebijakan selalu datang dari pusat. Sehingga para praktisi di

Sekolah Dasar tidak bisa mengembangkan metode baru atau inovasi baru sebelum memperoleh "lampu hijau" dari atasan. Persoalan sekarang, sampai kapan para Kepala Sekolah dan guru diberikan wewenang penuh menyelenggarakan pendidikan, lengkap dengan segala "kreasinya", tanpa harus banyak diganggu aneka teguran, hanya karena kurang paham. Jika Kepala Sekolah dan guru tidak diberikan wewenang dan kesempatan untuk mengadakan eksperimen dalam usaha meningkatkan kualitas belajar mengajar, akibatnya adalah mereka akan menjadi tidak kritis, tidak dinamis, serta tidak motivatif.

Kendala yang dirasakan Kepala Sekolah dan guru dalam usaha penerapan CBSA di sekolah dasar, selain pemahaman terhadap pendekatan CBSA itu perlu ditingkatkan lagi, maka penerapan CBSA menuntut persyaratan yang banyak, seperti kualitas guru yang prima, fasilitas pendidikan yang tidak terbatas pada alat peraga saja. Permasalahan yang dihadapi kini, seberapa jauh para guru mempunyai kebiasaan berfikir mandiri, memiliki iklim demokratis dan mampu mengembangkannya pada perilaku murid. Belum lagi di bidang sarana dan prasarana, seringkali Kepala Sekolah dihadapkan dengan anggaran sekolah yang terbatas, sehingga berbagai peralatan yang diperlukan tidak bisa mereka temukan. Hal yang sangat memperhatikan munculnya buku-buku

yang sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan CBSA, tetapi untuk menarik minat masyarakat, cover diganti dan ditambahi tulisan "Sesuai dengan CBSA". Tentunya cara seperti ini bukan merupakan tindakan terpuji, apalagi untuk bidang yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Penerapan pendekatan CBSA memerlukan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup, tanpa didukung dengan fasilitas seperti alat peraga, perlengkapan laboratorium, papan pajangan, buku-buku pelajaran, baik panduan maupun pendukung, serta berbagai prasarana perlengkapan lainnya, seperti lembaran kerja siswa, rasanya pendekatan CBSA sulit untuk diterapkan. Dengan kata lain faktor dana sangat berpengaruh. akibatnya sekolah yang mampu melaksanakan pendekatan CBSA dengan memadai, umumnya sekolah-sekolah yang mampu swadaya dana sendiri seperti sekolah percontohan, sekolah swasta. Sementara sekolah-sekolah negeri di daerah terpencil pelaksanaan CBSA sangat tergantung dari kreativitas Kepala Sekolah dan guru dalam menyulap keminiman fasilitas. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa penerapan CBSA perlu merubah suasana sekolah, perubahan itu membutuhkan adanya pusat sumber-sumber belajar (learning resources centre). Dala kenyataannya pusat-pusat seperti demikian hampir tidak ada, yang akhirnya melahirkan pesemisme baru, apakah dengan keadaan sistem sekolah yang

demikian bisa membawa siswa benar-benar belajar aktif ? Demikian juga sistem pelaksanaan tes sumatif dan Ebtanas, alat tes tersebut disusun dan digandakan oleh Kantor Departemen P dan K, cenderung mengukur hasil prestasi belajar siswa, tidak mampu mengukur ketrampilan proses yang merupakan inti dari pendekatan CBSA. Jadi tes dilakukan terhadap siswa hendaknya mampu mengukur proses dan hasil belajar siswa. Seharusnya wewenang pelaksanaan sistem tes sumatif dan Ebtanas diserahkan kepada sekolah masing-masing.

Salah satu tindakan strategis yang barangkali cukup mendasar adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan para penanggung jawab pendidikan di Sekolah Dasar, mulai dari tingkat propinsi sampai tingkat kecamatan, lebih leluasa berimprovisasi dan ber eksplorasi dalam mengembangkan pendidikan di daerahnya masing-masing (desentralisasi penyelenggaraan pendidikan). Dengan cara demikian, pada gilirannya hal itu akan bermuara pada munculnya keberanian dan kemampuan kepala sekolah dan guru untuk melakukan yang sama dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bila ada peraturan tertentu atau kebijakan yang harus dilaksanakan secara nasional, sebaiknya prinsip-prinsip saja yang dikeluarkan oleh pusat, sedangkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk

mengembangkannya. Dalam upaya perluasan desentralisasi pendidikan, sudah seharusnya daerah di tingkat atas memperhitungkan benar-benar kemampuan daerah di bawahnya, demikian pula daerah di bawah memperhitungkan benar-benar kemampuannya sendiri dalam menerima tanggung-jawab dari daerah di atasnya. Tetapi perlu berhati-hati agar jangan terjebak dalam budaya merasa serba mampu karena berada di atas, atau serba tidak mampu karena berada di bawah. Kalau kita terjebak demikian, Kepala Sekolah dan guru akan tetap saja seperti pekerja kasar (tukang).

4. Masalah-masalah yang perlu diteliti lebih lanjut.

Beberapa masalah yang perlu diteliti lebih lanjut berkenaan dengan aspek-aspek yang diteliti, adalah :

- a. Perlu diteliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif mengenai seberapa jauh kaitan dan determinasi aspek pemahaman Kepala Sekolah sebagai supervisor pengajaran, aktivitasnya menyusun program supervisi, terhadap efektivitas pelaksanaan supervisi pengajaran, dan penampilan mengajar guru di Sekolah Dasar. Penelitian kuantitatif ini direkomendasikan guna mendapatkan hasil yang baku.
- b. Perlu diteliti efektivitas pelaksanaan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif oleh guru-guru di Sekolah

Dasar dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

- c. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai konflik-konflik yang timbul sebagai akibat dari pemahaman Kepala Sekolah terhadap peranannya sebagai supervisor pengajaran, di satu pihak, dan penapilan Kepala Sekolah sebagai pembina profesional guru dalam rangka pelaksanaan CBSA di SD, di lain pihak.
- d. Dalam upaya pengembangan peranan kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran, perlu diteliti efektivitas pelaksanaan model supervisi yang diterapkan di Sekolah dasar sebagai hasil penataran, pada aspek faktor penghambat dan faktor penunjang, ke arah suatu model supervisi yang ideal untuk peranan Kepala Sekolah sebagai supervisor pengajaran yang diharapkan dari profesi ini mampu menunjang tugas guru sebagai pelaksana proses belajar mengajar di sekolah.